

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

## **A. PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Inflasi Provinsi Kalimantan Utara adalah merupakan Gabungan dari inflasi Kota Tarakan, Tanjung Selor, dan Kabupaten Nunukan. Secara bulan ke bulan/ *Month to month* (m-to-m) Povinsi Kalimantan Utara pada Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2024 tercatat mengalami tren yang fluktuatif. Inflasi bulan Oktober tercatat sebesar 0,17 persen, bulan November terjadi deflasi sebesar -0,12 persen, dan pada Desember terjadi inflasi sebesar 0,44 persen yang disebabkan karena adanya peningkatan permintaan pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (m-to-m) pada Desember 2024, antara lain: ikan bandeng, bawang merah, tomat, cabai rawit, bayam, kangkung, jagung manis, ikan cakalang, dan ikan layang. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi (m-to-m) antara lain angkutan udara, daging ayam ras, air kemasan, beras, labu parang, ikan mukair, emas perhiasan, mainan anak, dan daun singkong.

Secara tahun ke tahun/*year on year* (y-on-y), Inflasi Kalimantan Utara Triwulan IV Tahun 2024 (Oktober hingga Desember) secara berturut-turut pada bulan Oktober tercatat sebesar 2,20 persen, November 1,68 persen, dan Desember 2,29 persen

Inflasi Tahun Kalender/*Year to date* (y-to-d) Provinsi Kaltara pada bulan Desember 2024 tercatat sebesar 1,29 persen. Angka Inflasi tersebut tercatat lebih rendah dari sasaran inflasi yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2021 dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 yaitu sebesar  $2.5 \pm 1$  persen atau pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen.

Secara historis, inflasi Tahun Kalender Triwulan IV tahun 2024 tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahun kalender tahun 2022 dan tahun 2023

## **B. KOMODITAS YANG MEMBERIKAN ANDIL TERHADAP INFLASI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN IV TAHUN 2024**

### **1. Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran**

Inflasi (y-on-y) Provinsi Kalimantan Utara pada Desember 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,56 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,54 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,77 persen; kelompok transportasi sebesar 0,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,30 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 2,81 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,38 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok

perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,44 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,07 persen

10 Komoditas yang paling dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Desember 2024, antara lain: emas perhiasan, bawang merah, ikan layang, beras, kopi bubuk, minyak goreng, sigaret kretek mesin (skm), nasi dengan lauk, sigaret kretek tangan, dan telur ayam ras. Sedangkan 10 komoditas yang paling dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, antara lain: cabai rawit, air kemasan, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras, ikan bandeng, angkutan udara, tempe, bensin, dan tahu mentah.

## 2. Komoditas yang Memiliki Bobot Dominan dalam Penghitungan Inflasi

### a. Kategori Komoditas Makanan dan Non Makanan

Berdasarkan Survey Biaya Hidup BPS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dapat diidentifikasi beberapa komoditas makanan dan non makanan yang memiliki bobot dominan terhadap penghitungan inflasi di Kaltara. 10 besar komoditas makanan dan non makanan tersebut yaitu Tarif listrik dengan bobot 5,18%, Bensin 4,19%, Beras 3,94%, Nasi dengan lauk 3,11%, Biaya langganan internet 2,55%, Sewa rumah 2,44%, Tarif Air Minum PAM 2,37%, Daging Ayam Ras 1,86%, Bahan Bakar Rumah Tangga 1,84%, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) 1,83%

### b. Kategori Komoditas Makanan

10 besar komoditas makanan yang memiliki bobot dominan dalam penghitungan inflasi Kaltara yaitu Beras 3,94%, Daging Ayam Ras 1,86%, Minyak Goreng 1,46%, Ikan Layang/Ikan Benggol 1,27%, Ikan Bandeng/Ikan Bolu 1,11%, Telur Ayam Ras 1,00%, Kue Basah 0,91%, Cabai Rawit Udag Basah 0,73% dan bawang merah 0,56%

## **C. PERBANDINGAN INFLASI BULANAN (m-to-m) KALIMANTAN UTARA DAN NASIONAL**

Inflasi *month to month* Provinsi Kaltara pada Triwulan IV Tahun 2024 (Oktober hingga Desember) bila dibandingkan dengan inflasi nasional pada periode yang sama diketahui bahwa terdapat perbedaan arah di mana ketika inflasi nasional mengalami penurunan, justru inflasi Kaltara tercatat mengalami peningkatan. Demikian pula sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik inflasi antara Kaltara dengan mayoritas daerah lain di Indonesia

## **D. RISIKO INFLASI TRIWULAN I TAHUN 2025**

Beberapa risiko kenaikan Inflasi Kalimantan Utara yang perlu diwaspadai pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1446 Hijriah.
2. Adanya potensi gangguan Cuaca yang dapat mengganggu kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan.

Terjadi *shock* kebijakan pemerintah pusat yang di luar kewenangan daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

**A. SIKLUS INFLASI KALIMANTAN UTARA**

Secara historis dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Inflasi Kalimantan Utara terbagi menjadi dua siklus (Lihat Grafik 5) sebagai berikut:

- 1. Siklus peningkatan inflasi biasanya terjadi pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) yang disebabkan karena meningkatnya permintaan.
- 2. Siklus deflasi terjadi akibat melimpahnya pasokan barang di pasaran.

**B. KARAKTERISTIK INFLASI KALIMANTAN UTARA**

Berdasarkan data historis, diketahui bahwa inflasi Kalimantan Utara Tahun 2024 memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1. Inflasi kelompok *Administered Price* (AP) selalu berada di atas Indeks Harga Konsumen (IHK).
- 2. Inflasi kelompok *Administered Prices* fluktuatif tergantung siklus dan *shock* kebijakan Pemerintah Pusat.
- 3. Inflasi kelompok *Core* relatif stabil.
- 4. Inflasi *Volatile Food* (VF) cukup terjaga di level rendah dan relatif stabil.

**C. PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN III TAHUN  
2024**

Berdasarkan identifikasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan pengendalian inflasi Provinsi Kaltara yang perlu menjadi perhatian

No	Isu Strategis	Permasalahan
		<b>Tingginya disparitas harga komoditas antara Kaltara dengan Provinsi lainnya di Indonesia</b>
1.	<b>Keterjangkauan harga</b>	<b>Banyaknya komoditas yang diperdagangkan di pasar yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP)</b>

3.

		<b>Rendahnya produksi komoditas lokal</b>
		<b>Ketergantungan pasokan dari luar</b>
<b>2.</b>	<b>Ketersediaan Pasokan</b>	<b>Belum adanya gudang BULOG di wilayah Kabupaten Tana Tidung/ Kabupaten Malinau sehingga berpengaruh terhadap tingginya harga di Kabupaten Tana Tidung dan kabupaten Malinau</b>
<b>3.</b>	<b>Kelancaran Distribusi</b>	<b>Keterbatasan infrastruktur pelabuhan</b> <b>Mahalnya biaya bongkar muat barang dan buruh angkut</b> <b>Kerusakan jalan akibat faktor cuaca</b>
<b>4.</b>	<b>Komunikasi yang efektif</b>	<b>Belum sinergi dan efisiennya anggaran untuk kegiatan pengendalian inflasi daerah</b> <b>Adanya potensi ekspektasi inflasi karena meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan nasional (HBKN)</b>

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

## **A. KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI KALIMANTAN UTARA**

Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara ditempuh melalui strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif)

No Strategi	Kebijakan
	Melaksanakan kerja sama antar daerah dengan daerah penghasil komoditas.
	Melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah terhadap komoditas pemicu inflasi.
<b>1.</b>	<b>Keterjangkauan harga</b>
	Penguatan monitoring harga harian komoditas pangan strategis.
	Melaksanakan inspeksi mendadak ke distributor. Agen, dan pengecer agar tidak menjual barang dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

- Mewujudkan swasembada pangan daerah terutama terhadap komoditas pangan yang bisa dikembangkan di Provinsi Kalimantan Utara.
2. Ketersediaan Pasokan
    - Mendorong peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
    - Mendorong perbaikan sistem logistik daerah melalui penyediaan lahan untuk pembangunan gudang Perum Bulog untuk menjangkau wilayah Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau sebagai solusi untuk mengatasi tingginya harga komoditas.
    - Mendorong peningkatan infrastruktur pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara.
  3. Kelancaran Distribusi
    - Mendorong pengaturan tarif bongkar muat barang dan buruh angkut sebagai solusi tingginya biaya bongkar muat barang.
    - Mendorong perbaikan dan pembangunan jalan utamanya pada titik-titik yang rawan longsor yang dapat berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang.
  4. Komunikasi yang efektif
    - Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah serta stakeholders lainnya untuk mendorong sinergi dan kolaborasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah.
    - Menjaga ekspektasi inflasi masyarakat agar belanja bijak dan tidak melakukan *panic buying*.

## A. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI KALIMANTAN UTARA

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi Kalimantan Utara pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok yang dilaksanakan pada:
  1. 10-12 Oktober 2024 di Kota Tarakan.
  2. 22 Oktober di Kabupaten Bulungan.
  3. 16-18 Desember di Kabupaten Malinau.
  4. 18-20 Desember di Kabupaten Tana Tidung.
  5. 28-30 Desember di Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.
2. Memberikan bantuan Perpipaan (APBN) 30 Unit dengan realisasi 28 unit (Bulungan, Malinau, dan Nunukan)
3. Memberikan bantuan Perpompaaan total 30 Unit (APBN) realisasi 29 Unit (Bulungan, Malinau, dan Nunukan) serta 3 Unit (APBD) di Bulungan dan Nunukan.
4. Membangun Jalan Usaha Tani 4 paket ( $\pm 1$ Km/Paket) di Tarakan, Bulungan, dan Nunukan.
5. Mengadakan bantuan 20.000 bibit cabai rawit merah untuk kelompok wanita tani dan sarana perlindungan tanaman.
6. Mengadakan bantuan benih cabai dan sarana perlindungan tanaman dengan rincian sebagai berikut.

No	Kabupaten/Kota	Luas lahan (Ha)	Volume Bibit (Bks)	Pupuk SP 26 (Zak)	NPK Zak	Fungisida (Bks)	Mulsa (Roll)
1	Bulungan	7,5	75	22,5	22,5	22,5	30
2	Nunukan	5	50	15	15	15	20
3	Tarakan	3,5	35	10,5	10,5	10,5	14

4 Malinau	20	200	60	60	60	60
Jumlah	36	360	108	108	108	124

7. Melaksanakan penguatan kelembagaan pertanian melalui sekolah lapang.
8. Mengajukan usulan lintas penyeberangan perintis tahun 2025 (Nunukan-Tarakan, Nunukan Sei Menggaris, toli-toli-Tarakan, Tarakan Sebatik, Tarakan-Malinau, Tarakan-Tana Tidung).
9. Mengusulkan trayek penyeleggaraan angkutan perairan pelabuhan dengan menggunakan kapal milik negara (rede transport) tahun anggaran 2024 (Tarakan-Ancam-Tarakan).
10. Melaksanakan kegiatan pasar murah dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok di 5 titik lokasi di Provinsi Kalimantan Utara.13 November 2024 di Desa Long Nawang, Kabupaten Malinau, 3 Desember 2024 di Desa Kaliamok, Kabupaten Malinau, 5 Desember 2024 di Desa Mansalong, Kabupaten Nunukan, 10 Desember 2024 di Desa Tengkapak, Kabupaten Bulungan, 13 Desember 2024, di Desa Karang Anyar, Kota Tarakan.
11. Melakukan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 4 titik lokasi di Provinsi Kalimantan Utara (5 November di Kota Tarakan, 10 November di Kabupaten Nunukan, 5 Desember di Kota Tarakan, 5 Desember di Kabupaten Nunukan.
12. Melaksanakan kegiatan rakor dalam rangka meningkatkan komunikasi efektif dalam rangka pengendalian inflasi daerah dengan rincian sebagai berikut.
  1. Melaksanakan rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi daerah seluruh Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri yang diselenggarakan secara daring.
  2. Menghadiri Rapat Koordinasi TPID Wilayah Kalimantan di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 22 Oktober 2024.
  3. Melaksanakan High Level Meeting TPID Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada tanggal 9 Desember 2024 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
  4. Melaksanakan HLM dalam rangka kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjelang Natal dan Tahun Baru dalam rangkaantisipasi arus mudik dan lonjakan harga bahan pokok serta kelangkaan BBM pada 6 Desember 2024 di Hotel Luminor Tanjung Selor yang dipimpin oleh Gubernur.
  5. Melaksanakan Rapat Koordinasi Antar TPID se-Kalimantan Utara dalam rangka di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 19 Desember 2024 dipimpin oleh Sekretari Daerah..

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka memastikan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang tepat sasaran tentunya perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai bahan perbaikan lebih lanjut. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi daerah Provinsi Kalimantan Utara Triwulan IV tahun 2024

No	Kebijakan	Evaluasi
----	-----------	----------

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Melaksanakan kerja sama antar daerah dengan daerah penghasil komoditas.   | <p>Kerja sama antar daerah yang telah dilaksanakan baru sebatas Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja sama antara lain kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum sampai pada realisasi pertukaran komoditas pangan antar daerah. Ke depan perlu dijalin kerja sama yang nyata baik secara <i>Government to Government</i> (G-to-G) maupun Bisnis tu Bisnis (B-to-B).</p>                    |
| 2. | Melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) terhadap komoditas pemicu inflasi.  | <p>Operasi pasar dan GPM telah dilaksanakan dengan baik. Untuk pelaksanaan Operasi pasar dan GPM selanjutnya perlu disinergikan dengan instansi terkait lainnya dan berfokus hanya pada komoditas utama penyumbang inflasi dan dilaksanakan pada wilayah yang angka inflasinya tinggi.</p>   |
| 3. | Penguatan monitoring harga harian komoditas pangan strategis.   | <p>Monitoring harga harian sudah dilaksanakan oleh Disperindagkop melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui Panel harga Pangan serta Bank Indonesia melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dengan baik. Data pemantauan harga tersebut perlu dikolaborasikan dan dilakukan analisis lebih lanjut agar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi lebih tepat sasaran.</p> |
| 4. | Melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke distributor. Agen, dan pengecer agar tidak menjual barang dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) | <p>Pelaksanaan sidak telah dilaksanakan oleh Disperindagkop tetapi baru sebatas memantau harga yang naik dan turun. Sidak perlu dilakukan dengan data informasi awal terlebih dahulu dan difokuskan pada komoditas yang melebihi HET dan langka di pasaran untuk mencegah dan menindak terjadinya penyimpangan.</p>  |
| 5. | Mewujudkan swasembada pangan daerah terutama terhadap komoditas pangan yang bisa dikembangkan di Provinsi Kalimantan Utara                            | <p>Upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sudah dilakukan, tetapi belum signifikan meningkatkan pasokan komoditas pangan daerah sehingga pasokan sangat bergantung pada daerah lain.</p>   |
| 6. | Mendorong peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah   | <p>Peningkatan Cadangan Pangan pemerintah Daerah telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan bekerja sama dengan Perum BULOG utamanya terhadap komoditas beras. Perlu juga didorong cadangan pangan selain beras untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah.</p>  |

	Mendorong perbaikan sistem logistik daerah melalui penyediaan lahan untuk pembangunan gudang Perum Bulog terutama untuk wilayah	Belum adanya Gudang Perum Bulog di wilayah KTT dan Malinau menyebabkan tingginya harga komoditas di kedua wilayah tersebut sehingga perlu didorong adanya
7.	Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Kabupaten Malinau sebagai solusi untuk mengatasi tingginya harga komoditas di 2 (dua) kabupaten tersebut.	diskusi lebih lanjut antara Provinsi kaltara, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau dan Perum BULOG Kantor Cabang Bulungan untuk merealisasikan dibangunnya gudang untuk mengefisienkan distribusi pasokan.
	Mendorong peningkatan infrastruktur pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara.	Perlu adanya dorongan terhadap PT Pelindo (Persero) agar segera merealisasikan pengerukan dan pembangunan dermaga pelabuhan Malundung. Selain itu, perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan pelabuhan yang dikelola oleh Provinsi untuk perbaikan jalur distribusi barang.
8.		
	Mendorong pengaturan tarif bongkar muat barang dan buruh angkut sebagai solusi tingginya biaya bongkar muat barang.	Belum dilakukan pengaturan tarif bongkar muat. Perlu dilakukan kajian penurunan tarif bongkar muat barang dan biaya bongkar muat barang sebagai bahan diskusi bagi pengambilan kebijakan selanjutnya.
9.		
	Mendorong perbaikan dan pembangunan jalan utamanya pada titik-titik yang rawan longsor yang dapat berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang.	Telah dilaksanakan perbaikan jalan pada titik-titik yang rawan longsor oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara dan Besar Balai Jalan Nasional Kalimantan Timur.
10.		
	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah serta stakeholders lainnya untuk mendorong sinergi dan kolaborasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah.	Telah dilaksanakan koordinasi secara rutin melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah TPID se-Kalimantan, Rapat Koordinasi Mingguan TPID se-Indonesia, dan Rapat Teknis TPID Provinsi Kalimantan Utara.
11.		
	Menjaga ekspektasi inflasi masyarakat agar belanja bijak dan tidak melakukan <i>panic buying</i> .	Sudah dilaksanakan sosialisasi belanja bijak oleh instansi terkait, tetapi ke depan perlu dilakukan sosialisasi secara masif melalui media informasi yang dimiliki oleh masing-masing instansi.
12.		

## 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Memperhatikan karakteristik Inflasi dan kelompok pengeluaran yang dominan terhadap angka inflasi Kalimantan Utara pada Triwulan IV Tahun 2024, maka dapat direkomendasikan beberapa hal untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah di Triwulan I Tahun 2025

No.	Strategi	Rekomendasi
-----	----------	-------------



- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1. | Keterjangkauan harga    | <p>Perlu dilakukan kerja sama antar daerah dan jika perlu dibentuk BUMD Pangan/BLUD Pangan.</p> <p>Perlu dilakukan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah untuk komoditas yang sedang mengalami kenaikan harga tak terkendali di atas HET.</p> <p>Penguatan monitoring harga harian komoditas pangan strategis.</p> <p>Pemberian subsidi pada komoditas yang sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penguatan pengawasan sehingga subsidi tepat sasaran bagi masyarakat.</p>  |
| 2. | Ketersediaan Pasokan    | <p>Mewujudkan swasembada pangan dengan aksi nyata di lapangan.</p> <p>Pendataan sawah yang belum ada irigasi/irigasinya rusak.</p> <p>Penguatan informasi cuaca.</p> <p>Melakukan inspeksi pasar distributor, agen dan pengecer serta memberikan imbauan kepada distributor agar tidak menahan pasokan/penimbunan.</p>   |
| 3. | Kelancaran Distribusi   | <p>Tindak Lanjut Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah penghasil untuk mengisi persediaan selama masa tanam atau keterlambatan distribusi.</p> <p>Melaksanakan koordinasi bersama Kabupaten Tana Tidung dan Malinau dalam rangka membahas penyediaan lahan untuk pembangunan gudang Perum BULOG di salah satu wilayah tersebut.</p> <p>Mendorong dilaksanakannya pengerukan dermaga Pelabuhan Malundung, pembangunan dermaga Pelabuhan Malundung, pembangunan pelabuhan di Kabupaten Tana Tidung, dan pembangunan Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.</p> <p>Perlunya dilakukan kajian penurunan tarif bongkar muat dan upah buruh pelabuhan.</p> <p>Perbaikan dan pembangunan jalan yang rawan longsor.</p> |
| 4. | Komunikasi yang efektif | <p>Meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan sinergi dan kolaborasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah.</p> <p>Meningkatkan komunikasi yang efektif untuk mengendalikan ekspektasi masyarakat terutama menjelang hari besar Keagamaan Nasional.</p>  |